



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI PUSKESMAS DESA LONDUT KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Shinny Syafitri Sagala¹⁾; Nofi Susanti²⁾

¹⁾shinnysyafitrisagala@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²⁾nofisusanti@uinsu.ac.id, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrack

Stunting is one of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs), Currently in Indonesia it is still far from the target of a 14 percent reduction in 2024, the stunting rate in the Londut Village Health Center area has decreased from 58 people in 2023 to 5 people in 2024. Although there has been a significant decline, the rate of decline is still below the target set by the North Labuhan Batu Regency government, namely zero stunting in 2024. To analyze the implementation of stunting prevention policies at the Londut Village Health Center, North Labuhan Batu Regency, using descriptive qualitative methods through in-depth interviews with informants. The research method uses a descriptive qualitative approach with in-depth interview techniques with informants selected by purposive sampling. Data were collected from health workers, program implementers, and communities involved in the stunting prevention program. The results show that the implementation of the stunting prevention policy has been carried out well in accordance with Regent Regulation Number 30 of 2022. The Standard Operating Procedure (SOP) is running well, but community participation is still low. The availability of trained human resources and an adequate budget supports the program. Communication between the government and the community is effective. The characteristics of the Implementing Agency function well. The positive attitude of policy implementers contributes to the effectiveness of the program. However, social, economic and political factors remain obstacles due to the lack of community participation. The conclusion of this study is that the implementation of the stunting prevention policy at the Londut Village Health Center has been running effectively with good system support, but requires increased community participation to achieve the target of zero stunting.

Keywords: Implementation; Policy; Prevention; Stunting

Abstrak

Stunting adalah salah satu sasaran Sustainable Development Goals (SDGs), Saat ini di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024, angka stunting di wilayah Puskesmas Desa Londut berhasil menurun dari 58 orang pada tahun 2023 menjadi 5 orang pada tahun 2024. Meskipun telah mengalami penurunan yang signifikan, laju penurunan tersebut masih di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, yaitu zero stunting pada tahun 2024. Menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di Puskesmas Desa Londut, Kabupaten Labuhan Batu Utara, menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan informan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan dari tenaga kesehatan, pelaksana program, dan masyarakat yang terlibat dalam program pencegahan stunting. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan stunting telah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022. Standar Operasional Prosedur (SOP) berjalan baik, namun partisipasi masyarakat masih rendah. Ketersediaan sumber daya manusia terlatih dan anggaran yang memadai mendukung program. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat efektif. Karakteristik Badan Pelaksana berfungsi baik. Sikap positif pelaksana kebijakan berkontribusi pada efektivitas program. Namun, Faktor sosial, ekonomi dan politik masih menjadi hambatan karena kurangnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi kebijakan pencegahan stunting di Puskesmas Desa Londut telah berjalan efektif dengan dukungan sistem yang baik, namun memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencapai target zero stunting.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Pencegahan; Stunting

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya untuk mencapai SDGs kedua, yaitu memberantas kelaparan dan segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030 dengan tetap menjamin ketahanan pangan (Agri TA, et al, 2024). Pada tahun 2025, sasarannya adalah menurunkan prevalensi stunting hingga 40%.



Berbagai inisiatif nasional dan internasional untuk menurunkan angka stunting telah menjadi landasan yang kuat. Hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia masa depan sangat erat kaitannya dengan masalah stunting. Generasi muda dipandang sebagai investasi penting bagi kemajuan negara. Jika mayoritas anak Indonesia mengalami stunting, besar kemungkinan tantangan di masa mendatang akan memengaruhi potensi sumber daya manusia negara ini. Dalam menghadapi dinamika global, negara ini mungkin akan menghadapi tantangan untuk bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu, masalah stunting harus segera diatasi secara tuntas agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan di kemudian hari.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting. Melalui strategi yang matang dan terkoordinasi, undang-undang ini berupaya menurunkan angka kejadian stunting hingga 14% pada tahun 2024. Angka stunting pada balita akhir-akhir ini menurun, menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia. Antara tahun 2021 dan 2022, angka stunting menurun dari 24,4% menjadi 21,6%, menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Lebih jauh, prevalensi stunting nasional sedikit menurun menjadi 21,5%, menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Meskipun terjadi penurunan, angka penurunan tersebut masih di bawah target pemerintah (Tarmizi, 2024).

Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan 14 persen yang ditetapkan pada tahun 2024. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menemukan bahwa prevalensi stunting secara nasional sebesar 21,5%, yang berarti sekitar 0,8 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Sumatera Utara turun dari 21,1% pada tahun 2022 menjadi 18,95%, turun sebesar 2,2%. Prevalensi stunting di Kabupaten Labuhan Batu sebesar 27% pada tahun 2021. Menurut data tahun 2023, sebanyak 7,3% masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Utara mengalami stunting.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti, di wilayah Puskesmas Desa Londut, angka stunting telah turun dari 58 pada tahun 2023 menjadi 5 pada tahun 2024. Meski terjadi penurunan yang cukup signifikan, namun laju penurunan tersebut masih belum mencapai target zero stunting yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara pada tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang meyakini bahwa stunting disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan, sedangkan faktor tidak langsung yakni pemahaman masyarakat mengenai stunting masih kurang.

Kurangnya pemahaman tentang perlunya memberikan anak-anak nutrisi dan perawatan terbaik sejak usia dini, masalah stunting dan kesehatan anak terus menjadi tantangan yang signifikan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip Islam dapat menjadi taktik yang berguna dalam situasi ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan stunting. Pemahaman yang menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi terhambat oleh tidak adanya sinergi antara ajaran Islam dan keahlian medis. Untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, Islam sendiri menekankan nilai perawatan anak, sebagaimana dibuktikan oleh Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menganjurkan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan hingga dua tahun. Untuk mencegah stunting, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara ilmu kesehatan dan ajaran Islam, karena banyak orang tua masih belum sepenuhnya memahami atau mempraktikkan prinsip ini.

Melihat permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di Puskesmas Desa Londut Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini memfokuskan pada analisis komprehensif mengenai standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik, serta sikap pelaksana dalam upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut.



METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di Puskesmas Desa Londut, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian dilaksanakan pada Januari 2025 sampai selesai. Informan dipilih menggunakan purposive sampling yang terdiri dari 10 orang meliputi: 1 pemegang program gizi, 1 bidan desa, 1 kepala desa, 1 TTPS, 1 kepala puskesmas, dan 5 ibu yang memiliki balita. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan pasif, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2017). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rahmani et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting

Implementasi adalah rangkaian aktivitas yang berlangsung setelah suatu kebijakan dirancang dan diputuskan oleh pemerintah, dan implementasi berfungsi sebagai indikator untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan.

Menurut konsep Van Meter Van Horn, Implementasi Kebijakan melibatkan Enam Indikator utama yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar badan pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, serta Sikap Pelaksana. Keenam komponen ini perlu dioperasionalkan secara serentak karena masing-masing memiliki keterkaitan yang kuat dalam rangka mengoptimalkan pemahaman implementasi kebijakan (Haykal et al., 2024).

Standar dan Sasaran Kebijakan

Tabel 1. Hasil Wawancara Mengenai SOP Pelaksanaan Pencegahan Kejadian Stunting

Informan	Pernyataan
Informan Kunci Kepala Puskesmas	Kalau di Puskesmas, biasanya kami kasih arahan ke pemegang program dan petugas kesehatan supaya semua kegiatan bisa jalan bareng-bareng. Kami juga bikin rencana kerja bareng pemerintah desa dan TPPS, terus setiap kegiatan dievaluasi dan dilaporkan secara rutin ke Dinas Kesehatan.
Informan Utama Pemegang Program Gizi	Tugas saya lebih ke ngedata dan mantau status gizi anak-anak dan ibu hamil. Saya juga nyusun kegiatan seperti pemberian makanan tambahan (PMT), tablet tambah darah, dan edukasi gizi. Biasanya saya kerja bareng bidan desa buat ngasih pelatihan ke kader juga.
Informan Utama Bidan Desa	Saya ikut jalanin program pencegahan stunting, biasanya saya kerja bareng kader dan perangkat desa, terutama ngasih pelayanan ke ibu hamil dan balita
Informan Pendukung TPPS	Saya sebagai bagian dari TPPS biasanya mantau dan evaluasi kegiatan yang ada hubungannya sama pencegahan stunting, biar programnya sesuai rencana.



Informan Pendukung
Kepala Desa

kami dukung program stunting ini lewat anggaran dana desa. Kami juga dorong para kader dan warga buat aktif di posyandu, kegiatan edukasi, dan sanitasi. TPPS desa juga kami aktifkan dan kami sering pantau bareng Puskesmas.

Sumber: data diolah

Hasil wawancara mengenai SOP pelaksanaan pencegahan stunting menunjukkan kolaborasi yang kuat antara Kepala Puskesmas, pemegang program gizi, bidan desa, TPPS, dan kepala desa. Koordinasi dan evaluasi rutin penting untuk memastikan kegiatan berjalan sinergis.

Sumber Daya

Sumber daya ini bisa berupa dana atau insentif lain yang akan mendukung pelaksanaan secara efektif.

Sumber Daya Manusia

Tabel 2. Hasil Wawancara Mengenai Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Menunjang Kejadian Stunting

Informan	Pernyataan
Informan Kunci Kepala Puskesmas	Sudah cukup ya, sudah ada ahli gizi nya.
Informan Utama Pemegang Program Gizi	Ada pelatihan untuk staf dari dinkes dek.
Informan Utama Bidan Desa	Saat ini, saya rasa sudah cukup untuk menangani stunting. Kader-kader posyandu sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan.
Informan Pendukung Kepala Desa	Saya lihat sudah memadai dek. Kami ada bidan desa yang aktif, kader posyandu yang terlatih, serta dukungan dari TPPS dan perangkat desa.
Informan Pendukung TPPS	Saya rasa sudah memadai, Soalnya, ada kerjasama yang baik antara bidan desa, kader, dan perangkat desa. Kami bisa bagi tugas sesuai peran masing-masing, terus saling bantu dalam pendampingan dan memberikan edukasi ke masyarakat.

Sumber: data diolah

Sarana dan Prasarana

Tabel 3. Hasil Wawancara Mengenai Penyediaan Sarana dan Prasarana

Informan	Pernyataan
Informan Kunci Kepala Puskesmas	Sarana dan prasarana sudah cukup dan sudah memadai.
Informan Utama Pemegang program Gizi	Dibantu dengan dinas sektoral.
Informan Utama Bidan Desa	Disediakan oleh dinas dek.



Informan Pendukung TPPS	Disediakan oleh dinas.
Informan Pendukung Kepala Desa	Disediakan oleh dinas.

Sumber: data diolah

Anggaran

Tabel 4. Hasil Wawancara Mengenai Anggaran Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Stunting

Informan	Pernyataan
Informan Kunci Kepala Puskesmas	Ada anggarannya.
Informan Utama Pemegang program Gizi	Ada anggarannya.
Informan Utama Bidan Desa	Ada.
Informan Pendukung TPPS	Ada.
Informan Pendukung Kepala Desa	Ada anggarannya. Anggarannya itu bisa mencapai 30 sampai 40 juta tergantung masalah stuntingnya banyak atau enggak karena anggaran desa setiap tahunnya bisa berubah-ubah.

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia untuk menangani stunting sudah memadai, dengan adanya ahli gizi, bidan desa, dan kader posyandu yang terlatih. Sarana dan prasarana yang diperlukan juga sudah cukup dan disediakan oleh dinas terkait. Selain itu, semua informan mengonfirmasi adanya anggaran untuk program stunting, yang bervariasi antara 30 hingga 40 juta, tergantung pada tingkat masalah stunting yang dihadapi. Secara keseluruhan, kondisi ini mendukung pelaksanaan program secara efektif

Komunikasi antar Badan Pelaksana

Tabel 5. Hasil Wawancara Mengenai Pola Komunikasi Peraturan Bupati Dalam Pencegahan Stunting Nomor 30 Tahun 2022

Informan	Pernyataan
Informan Kunci Kepala Puskesmas	Jadi, biasanya setelah dapat info dari Bupati, kita rangkum dulu intinya. Habis itu baru kita sampaikan lagi ke masyarakat pakai bahasa yang lebih sederhana. Soalnya kan kalau bahasa dari instansi itu kadang susah dimengerti ya, terlalu formal atau banyak istilah. Nah, jasi tuh bikin info itu jadi lebih mudah dipahami, supaya masyarakat ngerti maksudnya dan bisa ikut apa yang disampaikan.
Informan Utama Pemegang Program Gizi	Kadang ada penyuluhan tentang stunting waktu posyandu.



Informan Utama Bidan Desa	Kalau saya komunikasinya ikut penyuluhan tentang stunting.
Informan Pendukung Kepala Desa	Saya selalu mendorong peran serta masyarakat, khususnya ibu hamil dan keluarga yang punya balita, supaya ikut aktif dalam program-program yang ada. Misalnya seperti pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak.
Informan Pendukung TTPS	Kami rutin melakukan koordinasi dengan tim gizi dan juga penanggung jawab program. Lewat koordinasi ini, kami bisa saling update informasi, bahas kendala di lapangan, dan cari solusi bareng-bareng supaya pelaksanaan program tetap berjalan lancar.

Sumber: data diolah

Hasil wawancara mengenai pola komunikasi terkait Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 dalam pencegahan stunting di Desa Londut menunjukkan upaya untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Kepala Puskesmas menjelaskan bahwa setelah menerima informasi dari Bupati, mereka merangkum inti pesan dan menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana agar masyarakat dapat mengerti dan berpartisipasi.

Karakteristik Badan Pelaksana

Tabel 6. Hasil Wawancara Mengenai Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan Stunting

Informan	Pernyataan
Informan Kunci Kepala Puskesmas	Ada dibuat tim nya.
Informan Utama Pemegang program Gizi	Ada tim nya.
Informan Utama Bidan Desa	Udah ada tim dan tugasnya masing-masing.
Informan Utama TTPS	Ada.
Informan Utama Kepala Desa	Itu udah dibentuk timnya sesuai peraturan yang berlaku dek.

Sumber: data diolah

Hasil wawancara mengenai pembentukan kelompok kerja pencegahan stunting semua informan menyatakan bahwa telah dibentuk kelompok kerja untuk pencegahan stunting. Kepala Puskesmas, pemegang program gizi, bidan desa, TTPS, dan kepala desa mengonfirmasi bahwa tim tersebut sudah ada dan masing-masing anggota memiliki tugas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya langkah konkret dalam upaya pencegahan stunting di daerah tersebut.



Sikap Pelaksana

Tabel 7. Hasil Wawancara Mengenai Sikap Pelaksana Kebijakan Terhadap Program Penurunan Stunting

Informan	Pernyataan
Informan Kunci Kepala Puskesmas	Baik sangat membantu pencegahan stunting.
Informan Utama Pemegang program Gizi	Sangat baik.
Informan Utama Bidan Desa	Baik.
Informan Pendukung TPPS	Baik.
Informan Pendukung Kepala Desa	Baik.

Sumber: data diolah

Hasil wawancara mengenai sikap pelaksana kebijakan semua informan menunjukkan sikap positif terhadap program penurunan stunting. Kepala Puskesmas menyatakan bahwa program tersebut sangat membantu dalam pencegahan stunting, sementara pemegang program gizi menilai program ini sangat baik. Bidang desa, TPPS, dan kepala desa juga memberikan penilaian baik terhadap program tersebut. Secara keseluruhan, sikap pelaksana kebijakan menunjukkan dukungan yang kuat terhadap upaya penurunan stunting.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan terhadap program penurunan stunting sangat positif, dengan semua informan menyatakan bahwa program ini baik dan membantu dalam pencegahan stunting. Dalam hal koordinasi, proses pelaksanaan program berjalan baik berkat kerja sama antar pihak.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Horn & Van Metter adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan. Kebijakan publik yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh lingkungan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi penyebab utama kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dalam upaya mengimplementasikan kebijakan, penting untuk mempertimbangkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Pengetahuan ibu balita di Wilayah Puskesmas Desa Londut Kabupaten Labuhan Batu Utara perihal program penanganan stunting masih kurang. Seperti wawancara ibu balita:

Lingkungan Sosial

Tabel 8. Hasil Wawancara Mengenai Pengetahuan Ibu Tentang Apa Itu Stunting

Informan	Pernyataan
Informan Pendukung Ibu Balita 1	Kekurang tinggi badan gitu dek.
Informan Pendukung Ibu Balita 2	Anak-anak yang pendek, tapi gatau juga saya.
Informan Pendukung Ibu Balita 3	Kurang gizi setau saya dek.
Informan Pendukung Ibu Balita 4	Ukuran tubuh balita yang kurang dari badan normalnya terus gak sesuai sama usianya.



Informan Pendukung
Ibu Balita 5

Anak yang gagal tumbuh karena kurang Gizi.

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan ibu tentang stunting bervariasi. Ibu Balita 1 mendefinisikan stunting sebagai kekurangan tinggi badan, sementara Ibu Balita 2 menyebutkan bahwa stunting berkaitan dengan anak-anak yang pendek, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami konsep tersebut. Ibu Balita 3 menyatakan bahwa stunting disebabkan oleh kurang gizi, ibu balita 4 menyatakan tubuh balita yang kurang dari badan normalnya dan Ibu Balita 5 menjelaskan bahwa stunting adalah ukuran tubuh balita yang kurang dari normal dan tidak sesuai dengan usia.

Perolehan wawancara mengenai tenaga kesehatan dalam melakukan penyuluhan terkait stunting dan gizi. Pernyataan dari informan pendukung :

Tabel 9. Hasil Wawancara Mengenai Tenaga Kesehatan Melakukan Penyuluhan Stunting

Informan	Pernyataan
Informan Pendukung Ibu Balita 1	Pernah dek
Informan Pendukung Ibu Balita 2	Pernah di balai desa waktu itu.
Informan Pendukung Ibu Balita 3	Gatau aku lupa dek.
Informan Pendukung Ibu Balita 4	Lupa gatau dek.
Informan Pendukung Ibu Balita 5	Kurang tau.

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil wawancara terdapat variasi dalam pengalaman ibu balita mengenai penyuluhan stunting yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ibu Balita 1 dan Ibu Balita 2 menyatakan bahwa mereka pernah mengikuti penyuluhan, dengan Ibu Balita 2 menyebutkan bahwa penyuluhan tersebut diadakan di balai desa. Namun, Ibu Balita 3, Ibu Balita 4, dan Ibu Balita 5 mengungkapkan bahwa mereka tidak ingat atau tidak tahu tentang penyuluhan tersebut. Meskipun ada beberapa ibu yang pernah mengikuti penyuluhan, masih terdapat ketidakpastian dan kurangnya pengetahuan di antara ibu-ibu lainnya mengenai kegiatan penyuluhan stunting.

Ekonomi

Tabel 10. Hasil Wawancara Mengenai Pekerjaan

Informan	Pernyataan
Informan Pendukung Ibu Balita 1	Saya ga kerja dek. Suami yang kerja di ladang
Informan Pendukung Ibu Balita 2	Saya ngurus rumah dek.
Informan Pendukung Ibu Balita 3	Saya jualan jajanan.
Informan Pendukung Ibu Balita 4	Saya dirumah aja ngurus pekerjaan rumah.
Informan Pendukung Ibu Balita 5	Suami saya yang kerja ke ladang.

Sumber: data diolah



Berdasarkan hasil wawancara mengenai pekerjaan yang mana ibu balita mengatakan bahwa sebagian besar tidak bekerja di luar rumah dan bergantung pada suami yang bekerja di ladang. Salah satu ibu menjual jajanan untuk membantu ekonomi keluarga.

Politik

Tabel 11. Hasil Wawancara Mengenai Pengetahuan Ibu Tentang Program Penanggulangan Stunting

Informan	Pernyataan
Informan Pendukung Ibu Balita 1	Kurang tau saya, setau saya kalau posyandu di kasih susu, telur, bubur kacang hijau.
Informan Pendukung Ibu Balita 2	Pokoknya pas posyandu di kasih makanan.
Informan Pendukung Ibu Balita 3	Saya gak ngikuti, tetapi petugas selalu ngasi makanan kayak susu, telur, bubur waktu posyandu.
Informan Pendukung Ibu Balita 4	Kalau programnya biasanya balita yang stunting atau yang gizinya kurang di berikan makanan tambahan si.
Informan Pendukung Ibu Balita 5	Saya pernah ikut waktu puskesmas mengadakan penyuluhan tentang stunting.

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil wawancara pengetahuan ibu balita tentang program penanggulangan stunting bervariasi. Ibu Balita 1 dan 4 mengungkapkan bahwa ia kurang tahu tentang program tersebut, tetapi ia mengetahui bahwa di posyandu mereka diberikan susu, telur, dan bubur kacang hijau. Ibu Balita 2 menyatakan bahwa di posyandu mereka diberikan makanan, meskipun tidak menjelaskan lebih lanjut. Ibu Balita 3 juga tidak mengikuti program tersebut secara aktif, tetapi ia menyebutkan bahwa petugas selalu memberikan makanan seperti susu, telur, dan bubur saat posyandu. Ibu Balita 5 memiliki pemahaman yang lebih baik, menjelaskan bahwa program tersebut biasanya ditujukan untuk balita yang stunting atau yang gizinya kurang, dan ia pernah mengikuti penyuluhan tentang stunting yang diadakan oleh puskesmas.

Tabel 12. Hasil Wawancara Mengenai Memberikan Supplement Dan Vitamin Kepada Anak

Informan	Pernyataan
Informan Pendukung Ibu Balita 1	Pernah dek.
Informan Pendukung Ibu Balita 2	Keknya pernah la dek.
Informan Pendukung Ibu Balita 3	Gak tau ibu dek.
Informan Pendukung Ibu Balita 4	Keknya pernah dek.
Informan Pendukung Ibu Balita 5	Pernah waktu di posyandu dek.

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh tenaga kesehatan memberikan supplement dan vitamin kepada balita yang datang ke posyandu.

Pembahasan

Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi SOP pencegahan stunting di Puskesmas Desa Londut menunjukkan



pelaksanaan yang cukup baik melalui keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk kepala puskesmas, pemegang program gizi, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), kepala desa, dan bidan desa. Namun, masih terdapat tantangan terkait pola pikir masyarakat dimana partisipasi masyarakat seringkali kurang, dengan banyak ibu yang tidak dapat hadir karena kesibukan sehingga berdampak pada pemahaman mereka tentang pencegahan stunting (Dalili et al., 2024).

Hal ini sejalan dengan penelitian Agustina et al. (2024) di Desa Kedungpari yang menyatakan bahwa pelaksanaan SOP yang melibatkan pendataan, pemantauan pertumbuhan, edukasi gizi, dan evaluasi rutin dapat berjalan dengan baik bila didukung partisipasi masyarakat (Agustina et al., 2024).

Dalam Perspektif Islam, Allah SWT menekankan umat islam untuk bekerja sama dan bersatu. Seperti yang tertuang dalam QS. Ali-Imran ayat 103:

وَأَعِظُوا آلَكُمْ وَآلَ آلِكُمْ أَنْ يُؤْخَفُوا

Artinya: "Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai"

Ayat ini menjadi landasan untuk membangun sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam struktur birokrasi. Ketika berbagai lembaga dan instansi pemerintah bekerja sama dengan harmonis, mereka dapat mengoptimalkan sumber daya dan meminimalkan selisih paham dalam program pencegahan stunting.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya di Puskesmas Desa Londut menunjukkan kondisi yang cukup mendukung untuk menangani masalah stunting. Ketersediaan sumber daya manusia menunjukkan tim yang memadai dengan adanya ahli gizi, pelatihan staf dari Dinas Kesehatan, serta keterlibatan bidan desa dan kader posyandu yang terlatih. Sarana dan prasarana yang diperlukan dinyatakan cukup memadai, serta anggaran tersedia dengan alokasi dana antara 30 hingga 40 juta rupiah yang disesuaikan dengan tingkat masalah stunting.

Hal ini sejalan dengan studi Nisa Andita Putri dan Suprayoga (2023) yang menjelaskan bahwa pemenuhan sumber daya di Kecamatan Bubutan telah tercapai, mencakup penyediaan personel di luar bidang kesehatan seperti kader sosialisasi dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) (Nisa Andita Putri, 2024).

Allah SWT telah menekankan pentingnya pendidikan dan pengajaran yang baik dalam mengembangkan kualitas SDM. Seperti yang tertuang dalam QS. An-Nahl ayat 125:

وَأَيُّكُمْ يَهْدِي اللَّهُ إِلَىٰ سُبُلِ الْحَقِّ وَالْإِسْلَامِ

Artinya: "Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik"

Peningkatan kualitas SDM yang efektif mencakup pemberian pelatihan dan pembelajaran kepada petugas kesehatan, educator, serta kader masyarakat yang terlibat dalam upaya pencegahan stunting agar dapat menyebarkan informasi dengan tepat guna.

Komunikasi antar Badan Pelaksana

Komunikasi yang diterapkan menunjukkan adanya upaya untuk menyederhanakan informasi yang diterima dari tingkat atas sebelum disampaikan kepada masyarakat. Kejelasan isi dari PERBUP Nomor 30 Tahun 2022 diakui memberikan panduan yang tepat mengenai peran desa dan pemerintah daerah dalam pencegahan stunting. Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan juga menjadi sorotan dengan arahan dari pemerintah pusat hingga daerah disampaikan dengan jelas.

Ini sejalan dengan penelitian Nisa Andita Putri bersama Suprayoga (2023) yang mengungkapkan bahwa komunikasi yang dijalankan pemerintahan Kecamatan Bubutan telah berjalan dengan memadai melalui aspek transmisi, kejelasan, serta konsistensi komunikasi (Nisa Andita Putri, 2024).



- BUMDes terhadap Kinerja BUMDes dengan Kompetensi Pengelolaan BUMDes sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(3), 443. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i3.11904>
- Nabila, A. S. N., Fitri Rahmawati, R., & Supriyanto, A. (2024). Pemberdayaan Dalam Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kudus. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 6(2), 165–182. <https://doi.org/10.18326/imej.v6i2.165-182>
- Neti Fitriani, Tri Yuniningsih, T. D. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN TANJUNG MAS. *Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro*, 1–14.
- Nisa Andita Putri, S. (2024). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya (Studi Kecamatan Bubutan). *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 3(3), 52–63. <https://doi.org/10.38156/jisp.v3i3.211>
- Nur Intan Marienda, I. R. (2024). Implementasi Program Penurunan Stunting Di Kota Sukabumi. *Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 10(November), 1039–1047.
- Rahmani, D. A., Muhayati, S., & Kholis, I. (2025). Analisis data kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. ALFABETA.
- Tarmizi, S. (2024). *Membentengi anak dari stunting* (Published).